

## *Empowering Fisherwomen in Galesong: Responding to the Challenges of Dual Roles Through a Participatory Approach*

### **Pemberdayaan Perempuan Nelayan di Galesong: Menjawab Tantangan Peran Ganda Melalui Pendekatan Partisipatif**

<sup>1\*</sup>A.Noer Chalifah Ramadhany, <sup>2</sup>A. Octamaya Tenri Awaru, <sup>3</sup>Zainal Arifin, <sup>4</sup>Tiara Nur'aini

<sup>1,2,3</sup>Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

<sup>4</sup>Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

#### ARTICLE INFO

##### Article History

Received: May 04, 2025

Accepted: June 05, 2025

Published: June 09, 2025

##### Corresponding author:

Email: [hendrasudarso27@gmail.com](mailto:hendrasudarso27@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.61220/sipakatau>

Copyright © 2025 The Authors



This is an open access article under the CC BY-SA license

#### ABSTRACT

*Fisherwomen in Galesong, Takalar Regency, play a significant dual role in the socio-economic life of coastal communities. Not only do they help their husbands in their fishing activities, they also return to their domestic roles as housewives. This condition causes participants to face double pressure, which has a serious impact on their health, productive capacity, and socio-economic well-being. Through a participatory approach, this activity seeks to explore the problems experienced by fisherwomen and identify potentials that can be developed in their empowerment efforts. The methods used include participatory observation, interviews, and focus group discussions (FGD) with fisherwomen. Despite having high enthusiasm and fighting spirit to support family welfare, they are still hampered by limited access to information, training, and formal role legitimacy. From this activity, recommendations emerged to present community-based empowerment programs that respond directly to the realities faced by women.*

**Keywords:** coastal communities, fisherwomen, dual roles, empowerment, socio-economic

#### ABSTRAK

Perempuan nelayan di Galesong, Kabupaten Takalar, memegang peran ganda yang signifikan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Tidak hanya membantu suami mereka dalam aktivitas melaut, mereka juga kembali menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan partisipan menghadapi tekanan ganda, yang berdampak serius pada kesehatan, kemampuan produktif, dan kesejahteraan sosial ekonomi mereka. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berupaya menggali permasalahan yang dialami oleh perempuan nelayan dan mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan dalam Upaya pemberdayaan mereka. Metode yang digunakan mencakup observasi partisipatif, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) bersama perempuan nelayan. Meskipun memiliki semangat dan daya juang yang tinggi untuk mendukung kesejahteraan keluarga, mereka masih terhambat oleh terbatasnya akses pada informasi, pelatihan, dan legitimasi peran secara formal. Dari kegiatan ini, muncul rekomendasi untuk menghadirkan program pemberdayaan yang berbasis komunitas dan merespon langsung realitas yang dihadapi perempuan.

**Kata kunci:** masyarakat pesisir, perempuan nelayan, peran ganda, pemberdayaan, sosial ekonomi

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi masyarakat pesisir. Di Daerah Galesong, Kabupaten Takalar, kegiatan melaut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga melibatkan perempuan yang sering berkontribusi dalam peran-peran yang kurang mendapat pengakuan resmi. Dalam masyarakat nelayan, peran perempuan mencakup kegiatan produktif dan domestik secara bersamaan, menciptakan kondisi peran ganda yang melelahkan, namun tidak selalu diakui secara struktural (Irwansyah & Supriadi, 2022).

Peran perempuan dalam masyarakat nelayan kerap dilihat sebatas pengelolaan urusan rumah. Namun, di banyak wilayah pesisir, termasuk Galesong, perempuan turut serta dalam proses pencarian nafkah, mereka ikut melaut, mengolah hasil tangkapan, hingga menjual ikan ke pasar. Sayangnya, keterlibatan ini masih dianggap sebagai “bantuan” terhadap tugas laki-laki, bukan sebagai kontribusi ekonomi utama. Setelah menyelesaikan pekerjaan produktif, mereka tetap dibebani tanggung jawab domestik seperti mengurus anak, memasak, dan membersihkan rumah. Hal ini menunjukkan peran ganda yang kompleks dan penuh tekanan (Wulandari et al., 2022).

Fenomena peran ganda bukan hanya soal banyaknya beban, tetapi juga tentang timpangnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan. Ketika perempuan bekerja di ruang publik dan tetap bertanggung jawab penuh di ranah privat, maka yang terjadi adalah bentuk subordinasi baru dalam kerangka kerja informal. Kegiatan domestik yang tidak hanya berbayar dan kerap dianggap “tugas kodrati perempuan” memperkuat beban kerja tanpa menambah legitimasi sosial atau ekonomi (Chandra, 2024).

Konstruksi gender dalam masyarakat maritim tradisional masih menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan dan penyokong ekonomi keluarga, sedangkan perempuan cenderung dilihat sebagai pendamping yang bekerja di ranah domestik (Cahya et al., 2019). Pandangan ini menyulitkan Upaya pemberdayaan perempuan karena sering kali dihadapkan pada resistensi budaya yang menormalisasikan ketimpangan peran (Afni et al., 2022). Di Galesong pengamatan awal menunjukkan bahwa meskipun perempuan menunjukkan peran aktif dalam kegiatan ekonomi, mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam keluarga maupun komunitas nelayan.

Beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengelola rumah tangga membuat perempuan nelayan rentan mengalami kelelahan fisik dan tekanan emosional. Perempuan mengalami kelelahan kronis, kurangnya waktu untuk diri sendiri, serta tekanan mental akibat beban yang terus menerus tanpa jeda. Hal ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap layanan Kesehatan, edukasi reproduksi, maupun fasilitas psikososial yang dapat mendukung kesejahteraan perempuan (Kamuli & Hatu, 2017). Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga berdampak pada pengasuhan anak dan dinamika rumah tangga, karena kelelahan menyebabkan kualitas interaksi sosial dalam keluarga menjadi rendah.

Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa perempuan yang memiliki peran ganda cenderung mengalami penurunan kualitas hidup jika tidak disertai dengan dukungan sosial yang memadai. Perempuan membutuhkan dukungan melalui kerja sama yang adil dalam urusan domestik, keikutsertaan dalam kelompok solidaritas perempuan, pelatihan keterampilan yang relevan, dan ruang untuk mengartikulasikan aspirasi mereka (Riwinda & Perdhana, 2022). Oleh karena itu, pendekatan pengabdian masyarakat yang melibatkan perempuan sebagai subjek aktif dan bukan objek penerima bantuan semata sangat dibutuhkan untuk mengurai masalah ini dari akarnya.

Penting untuk memahami bahwa peran ganda yang diemban perempuan bukan hanya merupakan masalah individu, tetapi berkaitan erat dengan sistem sosial dan struktur budaya yang ada (Kurniawati, 2017). Dalam masyarakat pesisir seperti di Galesong, konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat masih sangat kuat. Hal ini ditandai dengan adanya anggapan bahwa tugas rumah tangga sepenuhnya adalah tanggung jawab perempuan, meskipun mereka juga bekerja atau berkontribusi dalam kegiatan ekonomi keluarga (Wulandari et al., 2022). Pemahaman yang belum seimbang mengenai relasi peran antara laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya eksploitasi yang tidak disadari terhadap tenaga kerja perempuan di ranah domestik dan publik.

Pendekatan pengabdian masyarakat yang hanya bersifat karitatif tidak akan mampu menjawab akar dari persoalan ini. Diperlukan pendekatan transformatif yang mendorong perubahan sosial secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan kritis, dialog antarperan gender, serta pembangunan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis atau ekonomi perempuan, tetapi juga bertujuan membuka ruang bagi refleksi sosial dan penguatan kapasitas perempuan dalam membangun posisi tawar mereka di tingkat keluarga dan komunitas.

Salah satu strategi yang dianggap efektif dalam konteks ini adalah penggunaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai ruang belajar bersama (Afiyanti, 2008). FGD tidak hanya dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data, tetapi juga sebagai sarana reflektif di mana perempuan dapat mengutarakan pengalaman, perasaan, dan pemikirannya secara terbuka. Dalam FGD yang dilaksanakan, partisipan menunjukkan antusiasme dan solidaritas

yang tinggi ketika menyadari bahwa pengalaman mereka tidak dialami sendiri, melainkan menjadi bagian dari pola umum yang dialami oleh banyak perempuan lain.

Kegiatan ini juga berusaha membongkar narasi tunggal tentang perempuan pesisir sebagai kelompok “tertinggal” atau “lemah”, yang sering muncul dalam kebijakan pembangunan. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan mencoba memosisikan perempuan sebagai agen perubahan yang memiliki potensi dan kekuatan untuk menginisiasi transformasi sosial dari akar rumput. Hal ini sejalan dengan pandangan feminisme komunitarian yang menekankan pentingnya pengorganisasian perempuan berbasis pengalaman lokal (Irwansyah & Supriadi, 2022).

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sebuah model pendampingan yang tidak hanya responsif gender, tetapi juga berbasis kontekstual lokal. Kegiatan pengabdian ini tidak bertujuan untuk “mengajari” perempuan bagaimana menjadi mandiri, tetapi membuka ruang bagi mereka untuk menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah bentuk kontribusi penting terhadap ekonomi keluarga dan komunitas. Dengan begitu, pengakuan sosial dan dukungan struktural bisa mulai dibangun dari bawah ke atas (*bottom-up*).

Kegiatan pengabdian ini menjadi penting bukan hanya karena menysasar isu perempuan, tetapi karena ia menyentuh dimensi keadilan sosial dalam masyarakat maritim. Penguatan perempuan nelayan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pelengkap program ekonomi, melainkan sebagai fondasi utama bagi pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dan mitra setara dalam proses identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis pengalaman, serta perumusan solusi. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan, yaitu untuk menggali pengalaman dan kebutuhan perempuan secara mendalam serta membangun kesadaran kritis bersama dalam komunitas mereka sendiri (Lestari et al., 2021).

Pada tahap awal, dilakukan observasi lapangan dan pemetaan sosial untuk mengenali dinamika komunitas nelayan di Galesong, termasuk relasi gender yang terbentuk dalam aktivitas produktif dan domestik. Dalam tahap ini, tim pengabdian menjalin komunikasi awal dengan tokoh masyarakat, kepala dusun, dan kelompok informal perempuan yang telah aktif di wilayah tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah membangun kepercayaan dan memperoleh dukungan komunitas terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Setelah itu, tahap pelaksanaan inti, tahap ini merupakan inti dari kegiatan pengabdian, dimana dilakukan pelaksanaan FGD yang melibatkan 18 orang perempuan nelayan dari berbagai dusun di wilayah Galesong. Peserta dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam aktivitas melaut dan peran domestik. FGD dilaksanakan dalam suasana informal di balai dusun setempat, dengan pendampingan fasilitator perempuan dari tim pengabdian.

Proses FGD berlangsung selama kurang lebih 2 jam dalam satu sesi, yang difokuskan pada pengalaman harian menjalani peran ganda, beban fisik dan psikis yang dialami, strategi bertahan dan sumber daya yang mereka miliki, serta aspirasi terhadap pelatihan keterampilan, dukungan keluarga, dan bentuk pemberdayaan yang dibutuhkan. Diskusi di rekam dengan izin peserta dan dicatat secara naratif oleh tim notulen. Data yang diperoleh dari FGD dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, kebutuhan, serta potensi intervensi komunitas.



**Gambar 1.** Pemaparan hasil diskusi kelompok dan pencatatan oleh notulen

Setelah FGD, tim pengabdian melakukan pertemuan evaluatif bersama sebagian peserta dan perangkat desa untuk menyampaikan hasil sementara dan mendiskusikan bentuk tindak lanjut yang realistis dilakukan oleh komunitas. Beberapa usulan muncul dari peserta, seperti pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut, pelatihan kewirausahaan, dan pendirian kelompok usaha perempuan berbasis komunitas.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Galesong memberikan Gambaran mendalam tentang dinamika sosial dan peran ganda perempuan nelayan pada wilayah pesisir. Hasil dari FGD dan observasi partisipatif menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi yang besar dalam sektor produktif dan domestik secara bersamaan, namun kontribusi ini masih sering terpinggirkan dalam narasi pembangunan maupun dalam pengambilan keputusan komunitas.



Gambar 2. Pemaparan hasil diskusi dan pencatatan oleh notulen

#### 3.1 Peran Ganda dan Ketimpangan Sosial

Perempuan nelayan di Galesong mengalami dua peran utama secara bersamaan. Di ranah produktif, mereka membantu suami dalam melaut, mempersiapkan peralatan tangkap, membersihkan hasil tangkapan, hingga menjual produk laut ke pasar. Di sisi lain, mereka memikul tanggung jawab penuh atas pengelolaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, merawat anak, dan mengatur keuangan keluarga. Beban kerja yang panjang dan terus-menerus ini menciptakan peran ganda yang menimbulkan tekanan fisik dan psikologis secara signifikan (Wulandari et al., 2022).

Peran ganda yang dijalani oleh perempuan nelayan di Galesong mencerminkan manifestasi ketimpangan sosial berbasis gender yang bersifat struktural dan kultural. Ketimpangan ini tidak hanya muncul dari ketidakadilan dalam pembagian kerja, tetapi juga dari lemahnya pengakuan terhadap peran produktif perempuan dalam sistem ekonomi lokal. Dalam konteks masyarakat maritim, kerja perempuan seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari ekonomi utama, padahal kontribusi mereka dalam mata pencaharian keluarga sangat signifikan.

Peran ganda ini bukanlah sesuatu yang dipilih, melainkan lahir dari sistem sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang mengabdikan diri dalam dua ranah sekaligus. Beban ini diperparah oleh minimnya pembagian kerja yang adil antara suami dan istri. Di dalam FGD, banyak perempuan mengakui bahwa suami menganggap urusan rumah tangga sepenuhnya adalah tanggung jawab istri terlepas dari kenyataan bahwa perempuan juga ikut mencari nafkah.

Budaya yang berkembang di masyarakat pesisir cenderung memandang bahwa pekerjaan melaut yang dilakukan laki-laki lebih berat dan memiliki nilai lebih dibandingkan pekerjaan domestik yang dijalankan perempuan. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan justru menjalani beban kerja yang lebih panjang karena berperan di dua ranah sekaligus, yakni domestik (privat) dan sosial ekonomi (ruang publik). Perempuan bisa ikut melaut sejak subuh, dan setelah kembali dari laut, tetap harus mengurus rumah tangga tanpa adanya kompensasi waktu istirahat atau pengakuan atas jerih payahnya. Ini adalah bentuk *invisible labor* (kerja tak terlihat) yang memperkuat ketimpangan gender.

Lebih dari sekadar beban kerja, peran ganda juga menjadi indikator ketimpangan dalam hal distribusi *power* dan *voice* dalam rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Tidak sedikit perempuan yang meskipun ikut mencari nafkah, tetap tidak diberi kuasa penuh atas penghasilan yang mereka bantu hasilkan. Pengambilan keputusan dalam urusan ekonomi rumah tangga masih banyak dikuasai oleh laki-laki, termasuk

dalam hal pengelolaan pendapatan dari hasil jualan ikan yang dilakukan oleh istri. Hal ini menunjukkan adanya *gender asymmetry* dalam kepemilikan dan akses terhadap sumber daya.

Peran ganda menciptakan tantangan tidak hanya dalam hal waktu dan tenaga, tetapi juga dalam keseimbangan mental dan emosional. Beban untuk menjalani dua peran sekaligus seringkali membuat perempuan merasa wajib mengutamakan keluarga, sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi terbatas. Dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, beberapa perempuan menyampaikan bahwa mereka bersalah jika mengeluh atau beristirahat terlalu lama karena khawatir dianggap malas atau tidak patuh terhadap norma masyarakat. Ini menunjukkan bagaimana norma sosial patriarkal dapat mengekang kesehatan mental dan kebebasan emosional perempuan (Firdausi et al., 2021).

Ketimpangan ini tidak lepas dari konstruksi peran gender yang sudah mengakar sejak lama dan direproduksi secara turun-temurun melalui institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, dan budaya lokal. Relasi gender yang tidak seimbang tidak hanya bertahan karena dominasi langsung, tetapi juga karena legitimasi simbolik yang diberikan oleh masyarakat, termasuk perempuan itu sendiri, terhadap ketimpangan tersebut. Artinya, selama perempuan belum menyadari posisi struktural mereka dalam relasi sosial, maka peran ganda akan terus dianggap sebagai beban yang wajar, bukan sebagai masalah bersama yang harus dikritisi.

Dengan demikian, peran ganda perempuan bukan hanya masalah beban pribadi atau rumah tangga semata, melainkan juga merupakan refleksi ketidakadilan sosial yang lebih luas. Dalam perspektif pembangunan inklusif, ketimpangan ini menandakan perlunya perubahan dalam cara masyarakat memahami nilai kerja, redistribusi beban kerja dalam rumah tangga, serta pentingnya keadilan pengakuan terhadap peran perempuan.

### 3.2 Dampak Psikologis dan Kesehatan

Perempuan nelayan di Galesong mengungkapkan bahwa mereka kerap mengalami kelelahan ekstrem, nyeri otot dan gangguan tidur akibat ritme kerja yang panjang tanpa istirahat yang cukup. Selain itu, mereka sering merasa lemas dan letih setiap hari, namun tetap harus menjalankan tugas tanpa jeda. Dampak psikologis seperti stress, kehilangan semangat, hingga rasa bersalah jika tidak mampu menjalankan peran dengan baik juga sering muncul. Hal ini memperlihatkan adanya *burnout* yang tersembunyi di balik konstruksi peran ibu rumah tangga yang tangguh.

Mereka bekerja sejak dini hari, mulai dari mempersiapkan kebutuhan melaut, ikut mencari ikan bersama suami, hingga mengurus rumah tangga saat kembali ke darat. Situasi ini menciptakan siklus kerja tanpa jeda yang menguras energi fisik dan mental. Beberapa partisipan mengungkapkan bahwa mereka seringkali merasa tak memiliki waktu untuk diri sendiri, atau pekerjaan mereka terasa tak kunjung selesai. Ini merupakan bentuk nyata dari *time poverty*, yakni kemiskinan waktu yang banyak dialami perempuan di sektor informal dan rumah tangga.

Peran ganda yang dijalani perempuan tanpa adanya dukungan sosial dan pengakuan budaya sering menimbulkan tekanan psikologis yang tersembunyi. Meski merasa kelelahan, mereka tetap berusaha untuk selalu terlihat kuat. Perasaan bersalah jika tidak bisa memenuhi ekspektasi sosial sebagai ibu rumah tangga yang sempurna juga memperburuk beban emosional mereka. Kondisi ini disebut sebagai beban emosional tak terlihat (*invisible emotional burden*), di mana perempuan memikul tanggung jawab afektif keluarga tanpa dukungan yang memadai (Pujiati & Hayati, 2023).

Fenomena ini diperkuat oleh norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moral dan harmoni rumah tangga. Dalam banyak kasus, meskipun perempuan berkontribusi dalam penghasilan rumah tangga, mereka tetap dianggap bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan domestik dan emosional keluarga. Ini menyebabkan tekanan psikologis yang kompleks, karena mereka harus tampil kuat, sabar, dan ikhlas dalam situasi apa pun (Firdausi et al., 2021).

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, kondisi ini menandakan bahwa perempuan nelayan adalah kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan layanan kesehatan berbasis komunitas. Penguatan Upaya preventif, termasuk edukasi kesehatan reproduksi, manajemen stress, dan layanan kesehatan mental, sangat diperlukan di daerah pesisir.

Ketidakseimbangan ini mencerminkan ketimpangan struktural yang disebut oleh Hartmann sebagai bentuk subordinasi domestik, perempuan bekerja dua kali tetapi hanya satu yang dianggap bernilai (Huriani, 2021). Akibatnya, hak perempuan atas waktu pribadi, kesehatan, dan pengembangan diri menjadi terabaikan. Beban ini berisiko menurunkan kualitas pengasuhan anak, merusak keharmonisan keluarga, dan menurunkan produktivitas ekonomi perempuan dalam jangka panjang.

### 3.3 Kurangnya Dukungan Struktural dan Kebijakan Responsif Gender

Salah satu temuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah minimnya dukungan struktural yang diterima oleh perempuan nelayan, baik dari pemerintah desa, institusi lokal, maupun program pembangunan yang ada. Walaupun perempuan nelayan di Galesong memegang peran ganda yang sangat penting dalam

kehidupan ekonomi dan sosial keluarga, mereka hampir tidak terjangkau oleh program pemberdayaan yang afirmatif dan responsif gender.

Sebagian besar bantuan dari pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan, termasuk alat tangkap dan pelatihan keterampilan, cenderung disalurkan kepada laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Perempuan tidak diberikan ruang dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Bahkan, mereka sering tidak mengetahui adanya pelatihan atau akses bantuan yang seharusnya bisa juga menjangkau mereka.

Situasi ini mencerminkan kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek gender (*gender blind*), sehingga program dibuat tanpa mengakomodasi kebutuhan dan kondisi sosial perempuan. Bahwa kebijakan pembangunan yang netral secara gender justru memperkuat struktur patriarkal yang telah ada, karena tidak mengintervensi akar dari ketimpangan tersebut (Sudirman & Susilawaty, 2022).

Di sisi lain, lembaga desa maupun komunitas nelayan belum memiliki sistem yang mendukung partisipasi perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Forum musyawarah (*musrenbang*), perencanaan anggaran desa, dan program kemasyarakatan lebih banyak diikuti oleh laki-laki. Situasi tersebut menghambat perempuan dalam menyalurkan kebutuhan serta aspirasinya secara terbuka.

Perempuan nelayan masih menghadapi keterbatasan perlindungan hukum dan sosial yang membuat posisi mereka semakin rentan. Tidak ada payung hukum yang mengakui mereka sebagai pekerja sektor perikanan, sehingga mereka tidak tercatat dalam data penerima manfaat atau tidak mendapatkan perlindungan kerja. Faktanya, perempuan juga terlibat penuh dalam pekerjaan berat dan berisiko, baik di laut maupun dalam proses pascapanen. Hal ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip keadilan distribusi dan pengakuan (*recognition*) dalam pembangunan (Mudzakir, 2021).

Pengalaman dari perempuan di Galesong menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, asalkan diberi ruang dan pendampingan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini juga merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan perempuan serta mendorong pemerintah desa untuk menyusun program berbasis data dan kebutuhan riil perempuan pesisir.

### 3.4 Aspirasi dan Potensi Perempuan Pesisir

Meskipun menghadapi beban yang berat, perempuan di Galesong menunjukkan daya tahan dan semangat yang tinggi untuk memperbaiki keadaan mereka. Dalam diskusi kelompok, mereka mengusulkan berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan pengolahan hasil laut (abon ikan, kerupuk ikan, sambal rumput laut), pembuatan kerajinan dari limbah laut, hingga pelatihan dasar keuangan keluarga. Mereka berharap keterampilan tersebut dapat membantu menciptakan usaha sampingan atau kelompok usaha bersama yang mampu menopang kebutuhan rumah tangga.

Mereka juga mengusulkan pembentukan koperasi perempuan sebagai sarana untuk menabung, meminjam modal usaha, dan saling mendukung antaranggota. Keinginan ini menggambarkan kesadaran komunal mereka terhadap pentingnya ekonomi berbasis solidaritas sosial. Hal ini sejalan dengan konsep modal sosial (*social capital*) yang menjadi pijakan utama dalam Upaya pemberdayaan perempuan di wilayah pesisir (Putnam, 2000). Sebagai peserta FGD pernah memulai kegiatan informal seperti arisan, pengajian, dan kelompok memasak, yang berpotensi berkembang menjadi forum perempuan pesisir yang lebih terorganisir.



**Gambar 3.** Diskusi kelompok terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi perempuan di Galesong

Fakta ini menegaskan bahwa peran perempuan melampaui posisi pasif dalam pembangunan dan mencerminkan potensinya sebagai aktor perubahan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hooks, 2000) yang menyatakan bahwa perempuan dari komunitas terpinggirkan justru memiliki kekuatan politik yang besar ketika diberi ruang untuk menyuarakan pengalaman mereka dan membentuk gerakan dari bawah.

### 3.5 Peran Pendekatan Partisipatif dan FGD sebagai Ruang Transformatif

Pendekatan FGD tidak hanya bertujuan menghimpun data, melainkan juga membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan pengalaman, membangun solidaritas, dan menggagas perubahan. Pengalaman personal yang diungkapkan dalam forum ini turut membangun kesadaran kolektif bahwa persoalan yang mereka hadapi bersumber dari ketidakadilan struktural, bukan kesalahan individu.

FGD juga berfungsi sebagai media belajar bersama dan ruang aman untuk membangun solidaritas perempuan. Bagi sebagian besar perempuan yang terlibat, forum ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan pengalaman batin mereka yang selama ini dipendam. Melalui proses ini, perempuan mulai merefleksikan ulang posisi dan peran mereka, serta melihat peluang untuk membangun gerakan kolektif dari lingkup komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Participatory Rural Appraisal* (PRA) sebagaimana dirumuskan oleh (Lestari et al., 2021), bahwa orang-orang yang hidup dengan masalah adalah pihak yang paling tahu tentang situasi mereka dan memiliki kapasitas untuk menemukan jawabannya.

FGD dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang aman (*safe space*) di mana perempuan dapat mengutarakan pendapat tanpa rasa takut dihakimi atau diremehkan. selama diskusi, peserta mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka bisa berbicara secara terbuka tentang rasa lelah, tekanan psikologis, dan harapan mereka terhadap peran suami serta masyarakat. Dalam suasana yang egaliter dan penuh empati, pengalaman personal berubah menjadi kesadaran kolektif, atau oleh Freire disebut sebagai *conscientizacao* (kesadaran kritis atas realitas penindasan).



**Gambar 4.** Diskusi dengan Partisipan terkait permasalahan yang mereka hadapi

Ruang diskusi semacam ini juga membantu membangun solidaritas antarperempuan. Ketika mereka menyadari bahwa beban yang mereka alami bukan hanya milik pribadi, tetapi dialami oleh banyak orang lain dalam komunitasnya, terbentuklah ikatan sosial yang kuat. Nilai solidaritas yang tumbuh di antara mereka merupakan modal sosial strategis untuk mendorong perubahan berbasis komunitas, terutama di lingkungan pesisir yang masih memegang teguh prinsip gotong royong dan kekeluargaan.

Secara keseluruhan, metode FGD dalam pendekatan partisipatif terbukti bukan hanya alat untuk mengumpulkan suara, tetapi sarana untuk membangun kesadaran, solidaritas, dan strategi bersama. Ini adalah langkah awal penting menuju transformasi sosial yang lebih luas, di mana perempuan tidak hanya dipandang sebagai pengurus rumah tangga, tetapi sebagai subjek pembangunan yang aktif, sadar, dan terorganisir.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil menggali dan memetakan persoalan peran ganda yang dihadapi oleh perempuan nelayan di Galesong, Kabupaten Takalar. Perempuan terbukti berkontribusi secara langsung dalam aktivitas ekonomi, seperti melaut dan mengolah hasil laut, serta tetap dibebani pekerjaan domestik

seperti merawat anak, memasak, dan mengelola keuangan keluarga. Situasi ini melahirkan beban kerja fisik dan psikis yang kompleks, yang tidak diimbangi oleh pengakuan sosial maupun dukungan struktural yang memadai.

Melalui pendekatan partisipatif dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), terungkap bahwa perempuan memiliki aspirasi dan potensi besar untuk mengembangkan diri dan komunitasnya. Mereka menilai perlunya pelatihan keterampilan, pembentukan koperasi serta kelompok usaha perempuan, dan penyuluhan yang juga ditujukan kepada laki-laki sebagai strategi untuk mewujudkan keadilan gender. FGD terbukti menjadi ruang transformatif yang mendorong lahirnya kesadaran kritis, solidaritas, dan semangat kolektif untuk membangun perubahan dari akar rumput.

Sayangnya, kebijakan pembangunan dan program desa masih bersifat netral gender (*gender blind*), yang membuat perempuan pesisir sulit diakses oleh layanan, bantuan, maupun pelatihan. Keterbatasan keterlibatan perempuan dalam forum-forum resmi membuat peran mereka dalam proses pengambilan keputusan komunitas menjadi kurang signifikan. Secara keseluruhan, kegiatan ini mengungkap bahwa perempuan nelayan bukan sekadar pelengkap laki-laki, melainkan merupakan subjek aktif yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk memberdayakan diri. Dengan ruang dan pendampingan yang tepat, mereka mampu menginisiasi perubahan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Diharapkan pemerintah desa dan daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap perencanaan pembangunan desa, terutama yang berkaitan dengan bantuan ekonomi, pelatihan, dan layanan kesehatan, serta menyusun program pemberdayaan berbasis kebutuhan nyata perempuan pesisir melalui musyawarah yang melibatkan mereka secara aktif. Lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan program-program yang partisipatif dan transformatif, dengan memberi ruang bagi perempuan sebagai mitra aktif dan menyediakan pelatihan keterampilan yang mendukung ketahanan ekonomi mereka.

## REFERENSI

- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(1), 58–62. <https://doi.org/10.7454/jki.v12i1.201>
- Afni, N., Rezal, M., & Latoki, L. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(1), 19–48. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.980>
- Cahya, B. T., Salahuddin, M. S., & Baihaqi, J. (2019). MERETAS PERAN GANDA ISTRI NELAYAN DALAM HOUSEHOLD ECONOMY EMPOWERMENT. *Harkat: Media Komunikasi Gender*, 40–54.
- Chandra, W. (2024). *Perempuan Pemutus Rantai Kemiskinan Nelayan*. Mongabay. <https://mongabay.co.id/2024/08/26/perempuan-pemutus-rantai-kemiskinan-nelayan/>
- Firdausi, I. A., Sururi, A., & Malik, A. (2021). Konstruksi Sosial Perempuan Nelayan Dalam Pola Dan Relasi Sosiokultural Di Kawasan Pesisir Pantai Karangantu Serang Banten. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(2), 172–183. <https://doi.org/10.22437/titian.v5i2.15441>
- Hooks, B. (2000). *FEMINISM IS FOR EVERYBODY (Passionate Politics)*. South End Press.
- Huriani, Y. (2021). *Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan* (T. Rahman (ed.); 1st ed.). Lekkas. <https://digilib.uinsgd.ac.id/42622/1/fundamental-gender.pdf>
- Irwansyah, A., & Supriadi. (2022). Peran Ganda Perempuan Nelayan pada Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 11–17. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/hjis/index>
- Kamuli, S., & Hatu, R. A. (2017). *PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PESISIR (Kelembagaan, Kemitraan dan Agensi Perempuan di Gorontalo Utara)* (B. Amin (ed.)). Pustaka Indonesia Press (PIP). <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/pemberdayaan-perempuan-di-pesisir-kelembagaan-kemitraan-dan-agensi-perempuan-di-pesisir-utara-gorontalo.pdf>
- Kurniawati, A. (2017). Peran Istri Nelayan Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga. *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim*, 1, 311–320. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.160>
- Lestari, M. A., Santoso, M. B., & Mulyana, N. (2021). Penerapan Teknik Participatory Rural Appraisal (Pra) Dalam Menangani Permasalahan Sampah. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 513. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i3.29752>
- Mudzakkir, A. (2021). Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser. *Jurnal Ledalero*, 20(2), 235. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i2.234.235-257>
- Pujiati, S., & Hayati, N. (2023). Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Buruh Perempuan serta Implikasinya terhadap Ketahanan Sosial Keluarga. *Sosietas*, 13(1), 57–70. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i1.59644>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster. <https://books.google.co.id/books?id=rd2ibodep7UC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Riwinda, A. D., & Perdhana, M. S. (2022). Studi literatur mengenai peran ganda pada pekerja perempuan. *Diponegoro Journal of Management*, 11(4), 1–9.

- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). KESETARAAN GENDER DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs): SUATU REVIUW LITERATUR SISTEMATIS. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Wulandari, N., Indrianti, D. T., & Hilmi, M. I. (2022). Analisis Gender Peran Perempuan Pesisir Pada Ketahanan Keluarga Di Desa Puger Kulon Kabupaten Jember. *Jendela PLS*, 7(1), 52–60. <https://doi.org/10.37058/jpls.v7i1.4758>